

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang memegang teguh kepada kebebasan berpendapat dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang terdapat ornamen demokrasi seperti partai politik, pemilu, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan parlemen. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang menawarkan kebebasan pada warga negaranya dengan memberi kesempatan dalam menentukan kebijakan umum negara serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan.¹

Demokrasi di Indonesia terwujud dalam menghormati hak-hak asasi manusia seperti memberikan hak suara dalam pemilihan umum, mengambil keputusan dan kebebasan berpendapat baik secara langsung ataupun melalui media. Tingkat demokrasi suatu negara, diukur dengan kualitas penyelenggaraan pemilu di suatu negara karena memiliki hubungan yang erat dimana pemilu yang demokratis dapat tercipta secara berkualitas jujur dan adil. Sebab, pemilu merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung yang partisipasi pemilih merupakan hal paling menentukan keberhasilan dalam setiap pemilu.

Dalam era reformasi, transparansi dan globalisasi, dimana pembangunan politik dan demokrasi menjadi agenda utama yang dapat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat

¹ Siti Apridina Anggraini, Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 1.

luas khususnya pemuda penerus bangsa yang berdampak pada menurunnya kadar hubungan sosial masyarakat. Di sisi lain pembangunan kehidupan demokrasi yang seharusnya berjalan di atas norma-norma dan nilai-nilai etika pada kenyataannya lebih cenderung menjadi lingkungan yang saling mengedepankan membenaran diri, perlakuan saling menghujat, provoaktif serta anarkis sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif bagi perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat menghambat proses berjalannya demokrasi. Demokrasi yang berjalan lancar adalah sistem kekuasaan yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia, sesuai dengan regulasi yang mengatur dan berjalannya penegakan hukum yang independen.²

Dalam menjalankan demokrasi, Indonesia memiliki kesatuan badan yang mengatur dan mengawasi jalannya demokrasi yang berdaulat yaitu Kesbangpol. Badan Kesbangpol merupakan sebuah badan yang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kesbangpol yaitu pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya; pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, politik serta demokrasi.³ Dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam demokrasi, perlu dilakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di DKI Jakarta.

Kesbangpol sebagai unsur yang demokratis berperan besar dalam menyalurkan dan menjembatani kepentingan masyarakat melalui komunikasi yaitu dengan komunikasi politik,

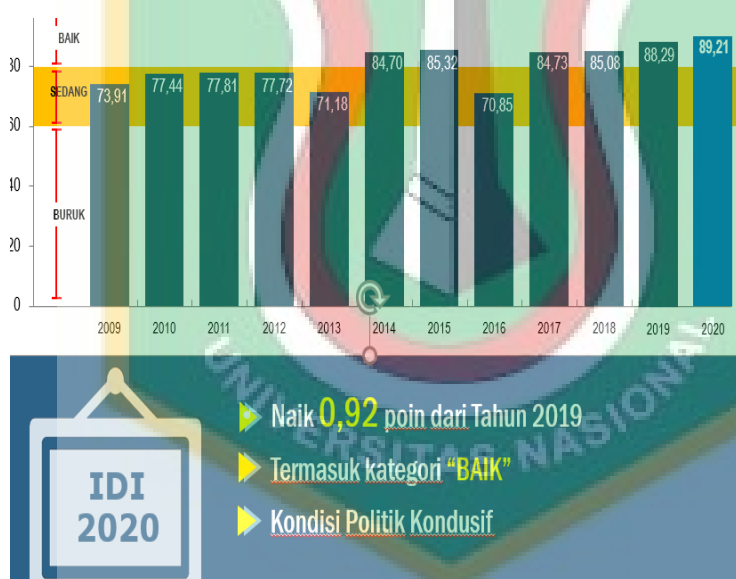
² Thomas Meyer, *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan* (Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2022). Hlm.1.

³ <https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>

sosialisasi politik, serta partisipasi politik kepada masyarakat salah satunya ialah kepada pemuda sehingga pembangunan politik yang demokratis diharapkan dapat terwujud secara optimal. Dalam menjalankan tugasnya, Kesbangpol ikut berperan dalam menguatkan demokrasi di DKI Jakarta. Dimana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi di DKI Jakarta memperoleh nilai tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia.⁴

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga Demokrasi. IDI dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub dll), Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam.⁵

Gambar 1. Perkembangan IDI DKI Jakarta pada tahun 2009 - 2020



⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/survei-bps-dki-jakarta-provinsi-paling-demokratis-di-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20melakukan%20survei,%20sebesar%2082%2C08%20poin.> (Diakses pada tanggal 4 September 2022 pukul 15.46)

⁵ <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Buku-IDI-2009.pdf>

Sumber: <https://twitter.com/aniesbasan/status/1434451657056612356/photo/2>

Berdasarkan data, demokrasi di DKI Jakarta pada tahun 2009 - 2013 berada pada kategori “sedang” (skor antara 60-80) yang menunjukkan bahwa perilaku dan sikap masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi belum matang dan masih membutuhkan peningkatan wawasan dalam demokrasi.

Selanjutnya perkembangan IDI pada tahun 2014 – 2020 mengalami peningkatan dan berada pada kategori “baik” (skor lebih dari 80). Namun pada tahun 2016, angka IDI berada pada titik terendah yaitu sebesar 70,85 yang dipengaruhi oleh Pilkada 2017 sehingga suhu politik di Jakarta mengalami peningkatan seperti misalnya catatan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dianggap bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), minimnya laporan kaderisasi Parpol dan rendahnya peran DPRD. Berdasarkan hal tersebut, sejak tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan upaya dalam peningkatan angka demokrasi di Jakarta.

Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya angka IDI Provinsi DKI Jakarta yang mulai naik secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 84,73 dan terus mengalami peningkatan sampai menjadi 89,21 di tahun 2020. Angka IDI Provinsi DKI Jakarta 2018 yang mencapai 85,08 disusun dari 3 aspek yaitu Kebebasan Sipil yang bernilai 95,09; Hak-hak Politik yang bernilai 75,43; dan Lembaga Demokrasi yang bernilai 87,82. Seperti dalam pesta demokrasi tahun 2019 terjadi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang mendorong pemuda meningkatkan keingintahuan dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk ikut aktif dalam dunia perpolitikan bangsa dengan menggunakan hak pilihnya serta dapat menyuarakan opininya akan calon-calon presiden terkait visi misinya selama 5 tahun ke depan.

Namun pada kenyataannya masih banyak sekali kasus yang berkaitan dengan demokrasi yang masih terjadi di masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta. Salah satu

indikator demokrasi yang berkaitan dengan hak sipil yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama.⁶

Tingkat indeks demokrasi di Provinsi DKI Jakarta mencapai posisi tertinggi dalam tiga tahun berturut-turut. Namun, pada implementasinya demokrasi di Jakarta masih ditemukan beberapa pelanggaran, salah satunya dalam kasus pemilu di Jakarta.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol DKI Jakarta mengajak masyarakat dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat demokrasi di DKI Jakarta. Seperti yang dikatakan Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri yang disampaikan oleh Theodor Adolf atau Dalvi bahwa sosialisasi politik yang dilakukan Kesbangpol sebagai ajang silaturahmi antar organisasi masyarakat dengan harapan dapat menambah wawasan tentang UU di bidang politik agar pemilu dan pilukada dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Dalvi juga turut menambahkan, dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sosialisasi berbagai regulasi yang mengatur proses pemilu, yakni UUD 1945, UU Pemilu, Peraturan Pemerintah hingga Keputusan KPU.⁷

Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu memberikan Pendidikan politik melalui sosialisasi politik dalam penguatan demokrasi di lingkungan pemuda Jakarta Barat. Latar belakang Kesbangpol menyelenggarakan sosialisasi politik ini sebagai bentuk penguatan demokrasi khususnya kepada pemuda sebagai penerus bangsa.

Penulis membahas pemuda dalam penelitian ini karena menarik dan penting untuk diamati, dimana pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan

⁶ [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf) (Diakses pada 8 September 2022 pukul 21.05)

⁷ <https://www.katakini.com/artikel/77396/kesbangpol-dki-jakarta-ajak-perkuat-persatuan-dan-kesatuan-bangsa/> (Diakses pada 15 Januari 2023 pukul 17.32)

kepemimpinan di Indonesia yang berperan sebagai partisipan penggerak awalnya demokrasi dan sebagai agen pembaharuan dalam menentukan arah perkembangan politik. Selain itu, pemuda merupakan kaum intelektual yang berpikir secara kritis ingin mencari kebenaran dan penyelesaian masalah dalam menganalisis regulasi dan kepemimpinan sebagai pelaksanaan demokrasi. Pemuda merupakan kelompok yang paling dinamis, mudah berubah dan paling mudah menerima pembaharuan baik itu bersifat positif maupun negatif.⁸

Salah satu cara pemuda berperan dalam penguatan demokrasi ialah dalam keterlibatan penyelenggaraan pemilu. Dimana pemilu dapat dimanfaatkan pemuda ikut terlibat dalam membangkitkan demokrasi di Indonesia khususnya di Jakarta. Selain itu, pemuda juga bisa berperan aktif secara langsung terjun ke lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan serta dalam kegiatan kerelawanan sosialisasi kepada masyarakat. Generasi pemuda ini lah sebagai generasi yang menyuarakan keadilan dan kesetaraan di tengah kehidupan demokrasi yang ternyata belum mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan sebagai sebuah realita yang harus disikapi oleh generasi selain milenial.⁹

Kemampuan Kesbangpol dan menanamkan berbagai nilai positif dalam diri pemuda akan menjadikan kelompok pemuda sebagai suatu kekuatan atau modal pembangunan yang tangguh di masa sekarang dan masa mendatang.

Dalam menyelenggarakan sosialisasi politik tersebut diperlukan fasilitator yang menjadi komunikator politik yang dapat membangun komunikasi dalam proses sosialisasi politik sebagai salah satu wujud peranan pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Pendidikan politik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Kesbangpol sebagai badan fasilitator bekerja sama dengan Lembaga atau organisasi untuk melakukan sosialisasi politik tentang kesatuan bangsa dan politik terhadap pemuda

⁸ Riwanto Tirtosudarmo, *Dinamika Sosial Pemuda di Perkotaan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997) hlm. xvii.

⁹ <https://beritabeta.com/peran-pemuda-dalam-menjaga-kewarasan-sebuah-demokrasi/all> (Diakses pada 12 Januari 2023)

karena memiliki urgensi yang penting dalam menanamkan sifat nasionalisme dan menciptakan demokrasi yang baik seperti salah satunya lembaga yang bekerja sama dengan Kesbangpol sebagai narasumber penguatan demokrasi adalah KPU yang membahas materi yang berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilu di Jakarta sebagai pewujudan terciptanya angka demokrasi yang baik. Selain bekerja sama dengan kelembagaan masyarakat, Kesbangpol juga bekerja sama dengan instansi pendidikan seperti SMA, SMK, Universitas dan sebagainya dalam menjalankan sosialisasi politik kepada pemuda.

Dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesbangpol sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkecukupan dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan politik masyarakat. Kesbangpol menggelar program sosialisasi dan pendidikan politik untuk pemilih pemula dengan berbagai tema dan materi yang berbeda mengenai politik¹⁰ Dengan adanya kegiatan sosialisasi politik ini maka pemerintahan dapat berjalan seperti tujuan pemerintah yaitu melindungi, melayani, dan membantu masyarakat. Dimana peran Kesbangpol sangatlah penting dalam kerangka *Stake Holders* (Pemerintah, *Civil Society*, dan Swasta).

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai sosialisasi politik dalam penguatan demokrasi kepada pemuda di Jakarta Barat sebagai salah satu peran Kesbangpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Penelitian ini juga ingin memfokuskan kepada fasilitas apa saja yang diberikan selama penyampaian materi dalam menjalankan program sosialisasi politik oleh Kesbangpol.

B. Rumusan masalah

1. Apa peran Kesbangpol dalam menjaga ketahanan demokrasi?

¹⁰ Pemkotdepok, —Tahun ini, Kesbangpol Adakan Pendidikan Politik Khusus Siswa SMK|| diakses melalui <https://www.depok.go.id>, pada 17 november 2022.

2. Bagaimana penguatan demokrasi yang dilakukan Kesbangpol melalui sosialisasi politik pemuda di Jakarta Barat?
3. Apa hasil dari kontribusi Kesbangpol dalam memperkuat demokrasi di Jakarta Barat?

C. Batasan Masalah

Batasan pada suatu masalah tujuannya agar menghindari adanya perluasan tentang masalah yang penulis buat, berikut adalah ada 3 batasan masalah:

1. Lingkup dalam penelitian ini hanya meliputi informasi dan data dari seputar Kesbangpol dan sosialisasi politik yang dilakukannya.
2. Penelitian ini berada di wilayah lingkungan Pemuda di Jakarta Barat
3. Sosialisasi politik yang dilakukan Kesbangpol pada pemuda di Jakarta Barat pada tahun 2018-2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan praktis.

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi akademis mengenai politik demokrasi di jurusan ilmu politik pada khususnya pada umumnya dan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Kesbangpol DKI Jakarta dalam salah satu perannya, yaitu sosialisasi kepada pemuda.

2. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi tugas sebagai syarat-syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta Selatan.

3. Manfaat khusus

Bagi penulis adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Kesbangpol yang belum penulis tahu sebelumnya, memperluas kreativitas dalam membahas serta menyusun karya ilmiah – karya ilmiah selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan terdiri dari 5 bab, masing-masing berisi tentang:

1. BAB 1 Pendahuluan:

BAB 1 berisikan tentang latar belakang masalah yang diambil dalam penelitian yaitu tentang sosialisasi politik yang dilakukan Kesbangpol dalam Penguatan Demokrasi pada Pemuda di Jakarta Barat, mengapa mengambil judul penelitian ini dan mengapa judul ini menarik untuk dibahas. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah yaitu bentuk penjabaran terhadap masalah yang diformulasikan dalam kalimat tanya, manfaat penelitian secara akademis, praktis dan khusus.

2. BAB 2 Kajian Pustaka:

BAB 2 ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu oleh pemudamahasiswi lain yang membahas tentang peran Kesbangpol dalam dunia politik seperti misalnya demokrasi. Dalam bab 2 ini juga membahas tentang konsep dan teori dimana konsep yang dibahas adalah konsep Kesbangpol dan konsep demokrasi serta teori yang digunakan yaitu teori sosialisasi politik. Selanjutnya dalam bab ini membahas kerangka pemikiran yang menghubungkan antara masalah yang dibahas dengan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. BAB 3 Metodologi Penelitian

Pada bab 3 berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

4. BAB 4 Penelitian

Pada bab 4 berisikan tentang profil dan sejarah Kesbangpol, tugas dan fungsi Kesbangpol Jakarta Barat, visi dan misi kesbangpol, program kegiatan yang dilakukan beserta metode kegiatan, materi kegiatan yang disosialisasikan oleh kesbangpol serta hasil percakapan antar penulis dan beberapa narasumber kesbangpol dan pemuda Jakarta Barat dengan menggambarkan hasil observasi, berupa percakapan wawancara dan analisis hasil wawancara.

5. BAB 5 Kesimpulan

Pada Bab 5 berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan selama penelitian mengenai permasalahan yang dibahas, serta saran-saran yang terdiri dari saran teoritis dan saran praktis.

